

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

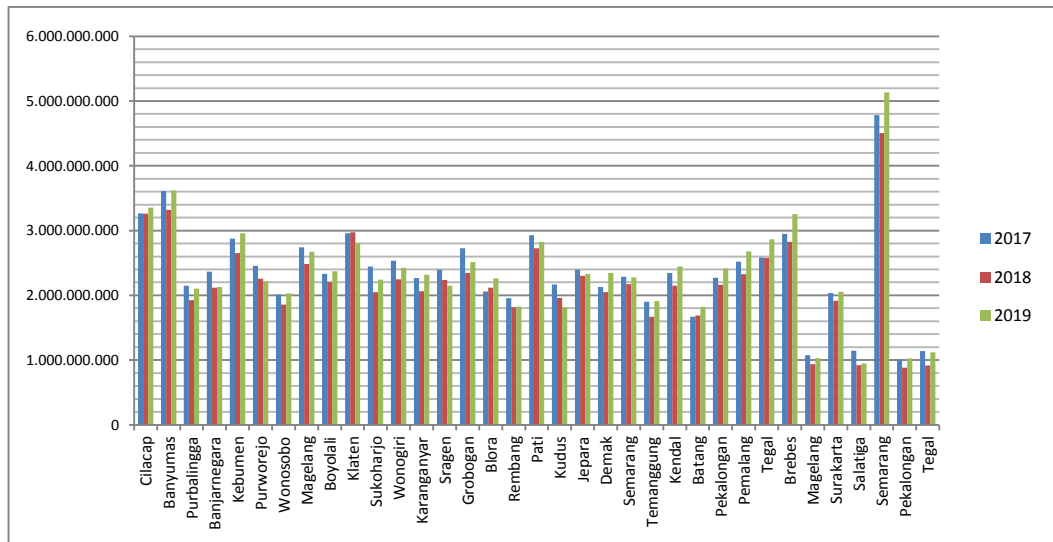
### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuat kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam suatu perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Talagammin dkk, 2018).

Proses pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah memberikan sebuah kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan mengalokasikan secara mandiri untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah dapat meratakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

pelayanan umum dan daya saing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan.



Grafik 1.1

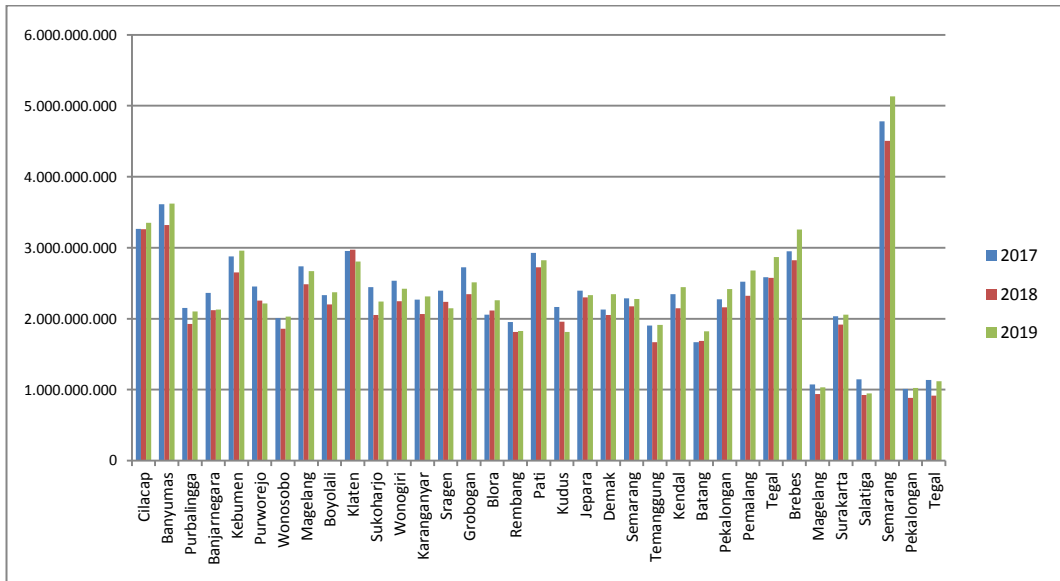
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Menurut Kabupaten/Kota, 2017 – 2019 (ribu rupiah)

Sumber : BPS Jateng

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun

anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Bitamala, 2018).

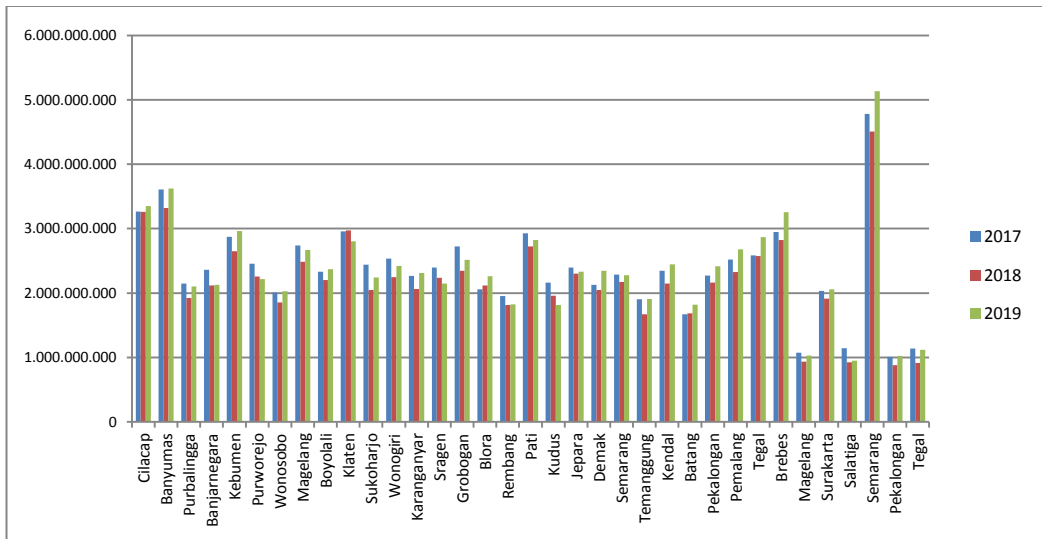
Dalam kajian *spending review* terkini terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu unsur ekonomi dan keuangan negara, prosesnya tidak terlepas dari tema desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah) menggantikan model sentralisasi yang telah dijalankan puluhan tahun sebelumnya. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan desentralisasi fiskal. Secara konseptual desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Mulai tahun 2001 muncul konsep dana perimbangan sebagai instrumen pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu instrument fiskal dana perimbangan selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (*horizontal imbalance*).



Grafik 1.2

Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota 2017 – 2019 (ribu rupiah)

Sumber : BPS Jateng

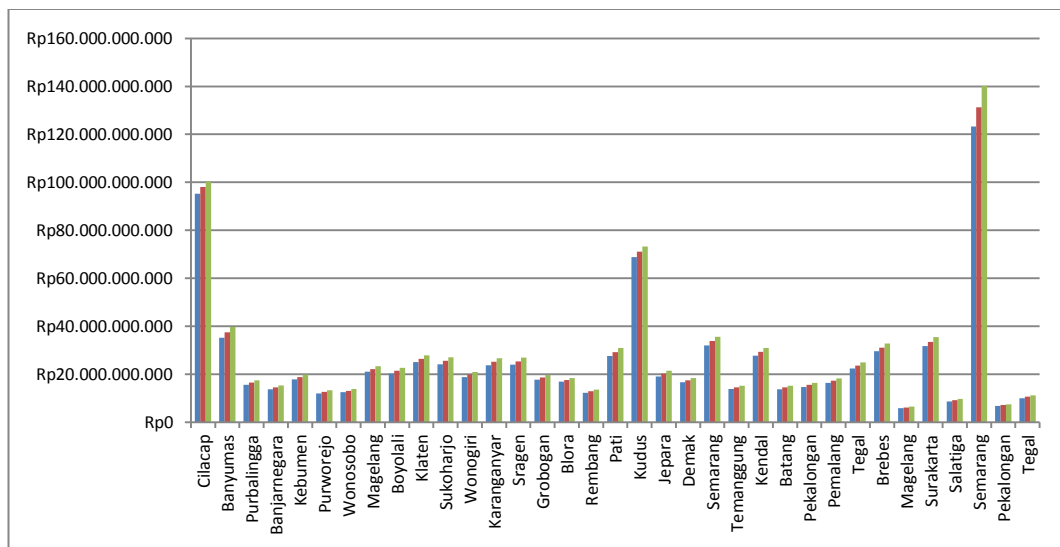


Grafik 1.3

Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah), 2017 – 2019.

Sumber : BPS Jateng

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang atau jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan perkapita. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu melalui optimalisasi potensi daerah yang dimiliki sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat dan pemasukan ekonomi daerah.



Grafik 1.4

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah), 2017 – 2019

Sumber : BPS Jateng

Ardiansyah dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah dikategorikan cukup berhasil dalam menggali potensi-potensi

pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah ini dalam mencapai kemandirian daerah tentunya harus diapresiasi karena inilah esensi dari diadakannya desentralisasi atau otonomi daerah. Implikasi penelitian yang dapat ditarik adalah bahwa semangat desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui kemandirian fiskal dalam upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi seyogyanya sudah menjadi perhatian serius bagi daerah-daerah yang belum mencapai itu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Determinan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / kota di Jawa Tengah.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana sebenarnya arah dan besarnya pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Jawa Tengah.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Menganalisis arah dan besarnya pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Jawa Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **E.1. Alat dan Model Penelitian**

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log GOV_{it} + \beta_2 \log DAU_{it} + \beta_3 \log DAK_{it} + e_{it}$$

di mana :

PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
$\log GOV$	: Pengeluaran Pemerintah Daerah
$\log DAU$	: Dana Alokasi Umum
$\log DAK$	: Dana Alokasi Khusus
$\log$	: Operator Logaritma berbasis $e$
$e$	: error
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	: Koefisien regresi variabel independen
$i$	: Observasi ke $i$
$t$	: Tahun ke $t$

### **E.2. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber atau diperoleh dari data Pengeluaran Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dalam *softcopy* Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) dan Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

## **F. Sistematika Penelitian**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang mendasari penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian. Bab ini berisi tentang Pengeluaran Pemerintah Daerah, Dana alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Dana alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan. Membahas ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data secara terperinci.

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil dari pengujian statistik yang digunakan dan selanjutnya dilakukan pembahasan dari hasil penelitian ini.



## BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya